



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Telepon/Faximili 021-57902925

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung: Muhammad Nur
No. HP: 081242132419

KLHK Tetapkan Tersangka Penebangan Ilegal di Hutan Ampang Kampaja, NTB

Sumbawa, 12 Juli 2020. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra dan penyidik Dinas LHK, Nusa Tenggara Barat, 10 Juli 2020, menetapkan A dan S sebagai tersangka illegal logging di kawasan hutan So Sumpit Kelopak Hutan Ampang Kampaja RTK 70, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyidik menitipkan kedua tersangka di Rutan Lapas Kelas II A Sumbawa dan masih melacak keberadaan pemodal berinisial T.

“Kami akan terus melacak pemodal maupun pemain lainnya. Terima kasih kepda para penegak hukum lainnya yang sudah membantu kami. Balai Gakkum tidak akan berhenti menegakkan hukum terhadap para perusak hutan,” kata M. Nur, Kepala Balai Gakkum Jabalnusra, 12 Juli 2020.

Pengungkapan kasus berawal dari kegiatan patroli Polisi Kehutanan Balai KPH Ampang Riwo, 8 Juli 2020, terkait informasi dari masyarakat ada penebangan pohon di kawasan hutan. Di lokasi, polisi kehutanan menemukan 5 orang sedang membuat pondok dan memperbaiki chainsaw. Polhut mendapati 2 *chainsaw* dan 8 batang kayu olahan sepanjang 12 m.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, plus Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun.

“Akibat perbuatan tersangka, terjadi kerusakan ekosistem sehingga hutan kehilangan fungsi ekologisnya yang akan berakibat banjir dan longsor. Kerugian secara ekonomi akan dihitung berdasarkan nilai tegakan pohon yang ditebang,” kata M Nur menjelaskan.

“Kami tidak akan kompromi dalam menghadapi para perusak hutan dan jaringannya, termasuk pemodalnya. Perbuatan merusak hutan itu sangat berdampak pada kualitas lingkungan dan sudah dirasakan masyarakat. Saya memohon agar pelaku dihukum seberat-beratnya, agar jera, apalagi pemodalnya” tegas Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum, KLHK, 12 Juli 2020, di Jakarta.

###